

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali)

Putu Vilia Puspitha¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: vilia.puspytha@gmail.com/ Telp : 091916351038

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak penyumbang pendapatan terbesar kedua dari sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak se-Bali periode 2012-2016. Jumlah sampel yang diteliti 8 Kantor Pelayanan Pajak. Metode penentuan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, inflasi, pajak pertambahan nilai.

ABSTRACT

Value Added Tax is one of the second largest tax revenue of the tax system. This study aims to determine and test empirically the influence of economic growth and inflation to the revenue value added tax. This research was conducted at Tax Office of Bali during the period 2012-2016. The number of samples under study 8 Tax Office. The method of determining the sample using non probability sampling method with saturated sampling technique, that is the entire population is sampled. Data collection was done through documentation. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, concluded that economic growth has a positive effect on value added tax revenue. Inflation has no effect on the revenue of value added tax.

Keyword: Economic growth, inflation, value added tax.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang terus meningkat dan anggaran yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara

Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN selalu ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan. Salah satu sumberdana yangdigunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak (Herman, 2007).Salahsatu jenis pajak yang memilikipotensi penerimaan cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Nazrulloh, 2015).

Menurut UU Nomor42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi dan dipungut pada setiap tahapan produksi, PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi dengan demikian maka pembagian beban pajak akan lebih merata karena setiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama (Utari, 2008). Tait (1988) yaitu Nilai tambah adalah nilai yang dihasilkan oleh produsen yang ditambahkan kepada bahan baku atau pembelian (termasuk tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa yang baru atau yang telah diolah. Menurut Schenk dan Oldman (2001) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi. Menurut Aizenman & Jinjark (2005) PPN sebagai penyumbang pendapatan terbesar kedua dari sistem perpajakan pada lebih dari 136 negara, PPN meningkat sekitar seperempat dari penerimaan pajak dunia. Menurut Ajakaiye (2000) PPN telah

menjadi sumber penerimaan di banyak negara berkembang. Beberapa negara Afrika seperti Guinea, Kenya, Madagaskar. Bukti ini menunjukkan bahwa PPN telah menjadi kontributor penting untuk penerimaan pajak di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Bali adalah salah satu daerah pariwisata dan provinsi yang memiliki sektor-sektor usaha yang strategis salah satunya sektor perdagangan. Sebagai daerah pariwisata, Bali adalah penyumbang devisa terbesar ke pusat dan meningkatnya sektor perdagangan ini menyebabkan potensi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak se-Bali akan meningkat terutama dari PPN. Kontribusi penerimaan PPN di KPP se-Bali tahun 2016 mencapai 78,5% pada penerimaan pajak di Bali, akan tetapi besarnya peranan PPN untuk membiayai pembangunan dan perekonomian rakyat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlihat pada perbandingan realisasi dan target penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bali tahun 2012- 2016 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP se-Bali
Tahun 2012-2016 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Target	1,289,983	1,954,148	2,148,116	2,415,719	2,406,193
Realisasi	1,374,007	2,722,160	1,591,017	2,150,470	2,087,787
Capaian	100.51%	100,30%	74,06%	89,02%	86.76%

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat penerimaan PPN dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, pencapaian penerimaan PPN tahun 2012 adalah pencapaian terbaik karena dapat melebihi target yaitu sebesar 100,51 persen. Pada tahun 2013 pencapaian realisasi penerimaan PPN masih dapat melebihi target sebesar 100,30

persen. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 74,06 persen. Tahun 2015 realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan dengan pencapaian sebesar 89,02 persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan sebesar 86,76 persen dari target PPN yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN di Bali belum maksimal. Direktorat Jendral Pajak maupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penerimaan PPN setiap tahun selalu meningkat, akan tetapi hal tersebut belum terwujud, sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui penyebab hal tersebut.

Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba meneliti mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian Nazrulloh (2015) dan Penelitian Prasojo (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian Nuraeni (2011) dan penelitian Nuryani (2016) menunjukkan hasil bahwa Inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Rahmawati (2013) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN dan inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Penelitian Warniti (2016) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh pada penerimaan PPN, tetapi beberapa penelitian lain menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti

memilih untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel makro ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi digunakan karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam makro ekonomi. Menurut Nota Keuangan dan APBN TA (2017) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPN adalah mendorong ekonomi makro dalam konsumsi dan daya beli masyarakat, selain itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Meningkatnya pengeluaran konsumsi secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan PPN. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam penerimaan PPN terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga yaitu stabilitas indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tahun 2016 penerimaan pajak secara alami akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, Bali secara makro ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Badan Pusat Statistik Bali mencatat bahwa sampai triwulan IV tahun 2016 ekonomi Bali mengalami perlambatan, jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2015. Ekonomi Bali hanya tumbuh sebesar 5,47 persen pada triwulan IV tahun 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,10 persen (Badan Pusat Statistik Bali, 2017). Menurut Myles (2000) pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman (1961), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya

penerimaan pajak. Menurut Heady (2000) seperti yang dikutip Gunawan (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak. Izedonmi dan Okunbor (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB menunjukkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Velaj dan Prendi, 2014).

Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia adalah pengaruh inflasi. Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian. Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus menerus dapat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global, tidak terkecuali para pelaku ekonomi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga keseluruhan (Case dan Fair, 2007). Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia adalah pengaruh inflasi, terutama untuk tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan serta inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Nersiwad, 2002).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh VitoTanzi (1977), Sinaga (2010) dan Kusmono (2011) dimana tingkat inflasi

dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan menurut David G and BernardJ (1977) mengatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi baik pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tingkat inflasi pun dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Rata-rata tingkat inflasi per tahun yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sebesar 5,48 persen, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,38 persen (Badan Pusat Statistik, 2017). Rata-rata tingkat inflasi per tahun yang terjadi di Bali tahun 2012-2016 sebesar 5,14 (Badan Pusat Statistik Bali, 2017).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan kegunaan teoritis bagi pihak terkait, yaitu untuk kegunaan teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, referensi serta mampu menjelaskan dan menggambarkan teori daya beli penerimaan PPN dimana semakin banyak barang yang di beli, maka semakin besar pajak yang dibebankan serta teori pertumbuhan Joseph Schumpeter dan teori Keynes mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. Kontribusi praktis pada Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah terhadap faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan menentukan kebijakan-kebijakan guna memaksimalkan penerimaan PPN sehingga penerimaan PPN dapat meningkat.

Penelitian ini dilandasi oleh teori daya beli. Teori ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Barang yang dibeli oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang mewah. Pajak yang berhubungan dengan transaksi ini dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin mahal barang yang dibeli oleh masyarakat maka pajak yang di pungut akan semakin besar (Lukman, 2016).

Teori Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan peran dari para pengusaha yang bisa membuat inovasi di dalam perekonomian. Adanya peran para pengusaha ini tentunya akan menambah tingkat konsumsi masyarakat dan pendapatan sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2014). Implikasi dari teori ini adalah apabila tingkat konsumsi masyarakat dan pendapatannya bertambah akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan suatu negara dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets, 2009). Pernyataan tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan Joseph Schumpeter dan teori daya beli yaitu diperlukan peran dari para pengusaha yang bisa membuat inovasi di dalam perekonomian dengan melakukan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat maka akan meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli atas barang dan jasa yang tersedia dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya

penerimaan PPN. Menurut Zeng (2013) pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Alex Sentami Putra, Amir Hasan dan Azhari (2012) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa karena pajak di masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2010) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian Prasajo (2015) dan Nazrulloh (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan penjelasan tersebut pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan penerimaan PPN sebagai penerimaan negara, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Inflasi sering kita pahami sebagai kenaikan harga-harga, Case dan Fair (2007) menyatakan bahwa tidak semua kenaikan harga menyebabkan inflasi. Boediono (2001), memberikan pengertian yang sedikit berbeda, yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Teori daya beli berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam bertansaksi dengan pihak lain. Teori Keynes menjelaskan inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar. Permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam

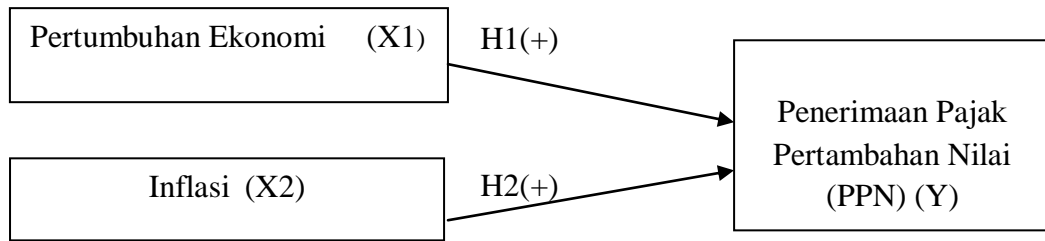
harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual-barang dan jasa tersebut dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN (Nuryani, 2016). Semakin tinggi inflasi maka pengenaan DPP atas konsumsi barang dan jasa akan meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Penelitian yang dilakukan Renata (2016) mengatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Locarno dan Staderini (2008) juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil yang sama juga dikatakan penelitian yang dilakukan Nuraheni (2011) Inflasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), Warniti (2016) Pratama (2016) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Inflasi berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Menurut Sugiyono (2014:6) penelitian yang berbentuk asosiatif tipe kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.
Desain Penelitian

Lokasi dari penelitian ini yakni seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Bali meliputi 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bali. Objek dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Variabel bebas (X) atau *independent variable* adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2014:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Inflasi (X2). Variabel pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dengan mengakses www.bali.bps.go.id berupa data PDRB tahunan periode 2012- 2016. Data PDRB tahunan dapat dihitung dengan:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

$PDRB_t$ = PDRB tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Data PDRB yang tersedia adalah data tahunan, maka data diolah dengan merubah data menggunakan *trend linear metode least square* dengan merubah periode

tahunan menjadi bulanan (Jimiramdani, 2016) sehingga didapatkan data pertumbuhan ekonomi per bulan dan dinyatakan dalam persen.

Variabel inflasi yang digunakan adalah inflasi perubahan *month to month* periode Januari 2012 - Desember 2016 yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Bali dengan mengakses www.bali.bps.go.id.

Pengukuran variabel inflasi didapat dengan rumus:

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

π : tingkat inflasi (tahun t)

IHK_t : tingkat harga IHK pada tahun t

IHK_{t-1} : tingkat harga IHK pada tahun sebelumnya

Variabel terikat (Y) atau *dependent variable* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2014:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di wilayah Bali. Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan namanya merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi. Ebrill, *et al* (2001) menyatakan bahwa PPN secara umum tidak ditujukan untuk menjadi pajak terhadap nilai tambah namun biasanya ditujukan sebagai suatu pajak atas konsumsi. Sedangkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabe yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan per bulan dari

Pajak Pertambahan Nilai di KPP se-Bali data yang diperoleh dari Kanwil DJP Bali selama 60 bulan terhitung Januari 2012 sampai dengan Desember 2016. PPN yang terhutang dihitung dengan cara:

PPN yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....(3)

Jenis datayang digunakan dalam penelitianini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2014:13). Data kuantitatif pada penelitian ini dengan data runtunwaktu (*time series*)berupa data bulanan dari Januari 2012–Desember 2016. Data yangdigunakan diperoleh dari BadanPusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dengan meakses situs www.bali.bps.go.idberupa PDRB dan inflasi bulananserta data penerimaan PPN setiap bulan pada KPP se-Bali yang diperoleh dari Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali. Sumber datadalam penelitianini yakni data sekunder.Datasekunderadalah datayang telah diolah yang diberikankepada pengumpuldata, misalnya lewat dokumen (Sugiyono,2014:193). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan PDRB dan inflasi per bulan diakses pada situs www.bali.bps.go.id sertajumlah penerimaan PPN seluruh KPP se-Bali yangdiperolehdari Kantor wilayah DirektoratJendral Pajak Bali tahun 2012-2016.

Populasi adalah wilayah generaliasasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi dalam penelitian iniadalah seluruh KPP di wilayah Bali.Sampel adalah bagiandari jumlah dan karakteristikyang dimilikioleh populasi tersebut (Sugiyono,

2014:116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah sampling jenuh dimana penentuan sampelnya adalah menggunakan seluruh populasi yang ada yaitu menggunakan 8 KPP se-Bali.

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2011:110). Pengujian tersebut akan memberikan hasil dari penolakan atau penerimaan dari hipotesis penelitian. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α = konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel X1, X2

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Inflasi

e = error

Analisis yang dilakukan dapat diamati pula mengenai uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji statistik t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik variabel dalam penelitian yang berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai deviasi standar ditunjukkan dalam hasil statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan_Ekonomi	41	7.27	12.94	9.9346	1.37809
Inflasi	41	.06	1.41	.4824	.33087
Penerimaan_PPN	41	60.22	234.02	131.4690	41.82664
Valid N (listwise)	41				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 2 memperlihatkan gambaran secara umum statistik deskriptif variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 41 observasi setelah mengeluarkan data *outlier* sebanyak 19 observasi. Variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai minimum sebesar 7,27 dan nilai maksimum sebesar 12,94. Nilai rata-rata sebesar 9,93 dengan standar deviasi sebesar 1,37. Nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata, sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lain tidak tergolong tinggi. Variabel Inflasi menunjukkan nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 1,41. Nilai rata-rata sebesar 0,482 dengan standar deviasi 0,33. Nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lain tidak tergolong tinggi.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen atau variabel independen atau pun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari pada *level of significant* yang

dipakai yaitu 0,05 (5 persen). Hasil pengujian normalitas untuk semua variabel dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	30,40867055
	Absolute	0,159
Most Extreme Differences	Positive	0,130
	Negative	-0,159
Kolmogorov-Smirnov Z		1,016
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,254

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil uji normalitas variabel penelitian dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal. Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa nilai Z untuk variabel *unstandardized residual* adalah sebesar 1,016. Variabel penelitian mempunyai nilai signifikan 0,254 lebih besar dari 0,05, artinya semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika dalam model terdapat hubungan linier antarseluruh variabel independen, maka dapat dikatakan model regresi terkena multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai VIF. Apabila nilai VIF di atas 10, maka antar variabel independen terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF di bawah 10, maka antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi	0,816	1,226
Inflasi	0,816	1,226

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4, nilai VIF pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,226 atau lebih kecil dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Nilai VIF pada variabel Inflasi sebesar 1,226 atau lebih kecil dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Analisis terhadap masalah autokorelasi dilakukan dengan pengujian *durbin-watson*. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

dW hitung	dW tabel (n=41; k=2) dl = 1,399; du = 1,603	Keterangan
1,973	du < dW < (4-du) 1,603 < dW < (2,397)	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 persen, data pengamatan yang dimiliki sebanyak 41, variabel independen sebanyak 19 dan memiliki 2 variabel bebas, maka dapat dilihat dalam Tabel *Durbin-Watson* menghasilkan nilai du sebesar 1,603. Berdasarkan ketentuan pengujian, model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi apabila $du < dW < (4 - du)$. Hasil

pengujian *durbin-watson* sebesar 1,973 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,603 dan nilai dari $4-du$ (2,397). Nilai $DW > nilai\ dU$ dan nilai $DW < nilai\ 4-dU$ oleh karena itu model regresi tidak memiliki gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Akibat dari adanya heteroskedastisitas pada hasil regresi, adalah varian tidak lagi minimum, pengujian dari koefisien regresi menjadi kurang kuat, koefisien penaksir menjadi bias dan kesimpulan yang diambil menjadi salah. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients		
	B	Beta		
(Constant)	-13,835		-0,428	0,671
Pertumbuhan Ekonomi	2,707	0,163	0,923	0,362
Inflasi	13,784	0,199	1,128	0,266

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dua variabel independen adalah 0,365 dan 0,267. Nilai signifikansi pada variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi lolos dari uji asumsi klasik. Dalam model analisis regresi linear berganda yang menjadi variabel bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi dan

inflasi, yang menjadi variabel terikatnya adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized	Standardized Coefficients		t	Sig.
	Coefficients	B	Beta		
(Constant)	-102,194			-2,304	0,025
Pertumbuhan ekonomi	22,501		0,741	5,677	0,000
Inflasi	20,989		0,166	1,271	0,211
F _{hitung}	= 16,947				
Sig F _{hitung}	= 0,000				

Sumber: Data primer diolah, 2017

$$Y = -102,194 + 22,501X_1 + 20,989X_2 + e$$

Konstanta (α) sebesar -102,194 menyatakan bahwa jika variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi diasumsikan bernilai 0, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan bernilai negatif sebesar 102,194. Koefisien (β_1) variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 22,501 artinya apabila nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 22,501 dengan asumsi nilai variabel independen inflasi (X_2) konstan (tidak berubah). Koefisien (β_2) variabel Inflasi sebesar 0,402 artinya apabila nilai variabel Inflasi mengalami kenaikan 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 20,989 dengan asumsi nilai variabel independen pertumbuhan ekonomi (X_1) konstan (tidak berubah).

Uji statistik F atau *Analysis of Variance* (ANOVA) dilakukan untuk membuktikan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh pada variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi F

lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka model regresi signifikan secara statistik dan cocok untuk digunakan. Dari hasil *output* analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk uji F

Model	Sum of Sqsars	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32991,220	2	16495,610	16,947	0,000
Residual	36987,490	38	973,355		
Total	69978,710	40			

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka model regresi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini layak digunakan.

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variansi variabel independennya. Hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9.
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,687 ^a	0,471	0,444	31,198

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 9 terlihat nilai *Adjusted R²* sebesar 0,471 atau 47,1 persen. Terlihat bahwa kemampuan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu penerimaan PPN adalah sebesar 47,1 persen saja pada model penelitian, sedangkan sisanya

sebesar 52,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi uji pertumbuhan ekonomi dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 22,501 dengan signifikansi sebesar 0,000 $< 0,05$; maka variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil uji t pengaruh inflasi pada penerimaan PPN menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,211 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Variabel inflasi memiliki nilai koefisien 20,989 dengan signifikansi sebesar 0,211 $> 0,05$; maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hubungan yang positif ini sesuai dengan teori Joseph Schumpeter dan teori daya beli yaitu diperlukan peran dari para pengusaha yang bisa membuat inovasi di dalam perekonomian dengan melakukan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli atas barang dan jasa yang tersedia. Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya berdampak baik bagi produsen dan konsumen tetapi juga penerimaan negara, khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sinaga (2010), Alex Sentami Putra, Amir Hasan dan Azhari (2012), Nazrulloh (2015) dan Prasojo (2015) dan Suhada (2016) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penerimaan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN. Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang – orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga – harga sehingga orang akan lebih cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012).

Terjadinya inflasi kemungkinan akan terjadi kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap

sama tidak terjadi kenaikan. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi maka penerimaan PPN pun tidak maksimal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dan Warnita (2016) yang membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Renata (2016), Locarno dan Staderini (2008), dan Nuraheni (2011) bahwa inflasi berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN.

SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi di Bali meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Artinya jika terjadi inflasi mengakibatkan kuantitas barang yang dihasilkan menurun tetapi harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap sama tidak terjadi kenaikan.

Saran yang dapat disampaikan pada pemerintah sebagai salah satu stimulus dari pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki struktur APBD dan diarahkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerintah hendaknya dapat menekan inflasi agar tidak terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Direktorat Jendral Pajak di Bali disarankan agar dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dalam hal ini adalah variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk menjadi bahan pertimbangan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi hanya berpengaruh 47,1 persen pada penerimaan PPN untuk itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan

dapat meneliti variabel lain karena variabel dalam penelitian ini masih terbatas dan berfokus pada variabel makro ekonomi saja.

REFERENSI

- Aizenman, Joshua, Yothun Jinjark. 2005. The Collection Efficiency Of The Value Added Tax: Theory And International Evidence. *National Bureau Working Paper IJEL*, 15(21):pp:571-610.
- Ajakaiye, D.O. 2000. Macroeconomic Effects Of VAT In Nigeria: A Computable General Equilibrium Analysis. *AERC Research Paper 92*, 15(3):pp:344-371.
- Alex Sentami Putra, Dr. H. Amir Hasan MS, MM., Ak. Dan Drs. Azhari, MA., Ak. 2014. Effect Of Total Taxable Entrepreneurs (PFM), Income Per Capita, Inflation, And Economic Growth Of Revenue Service Tax Vat Office Pekanbaru. *Jom Fekon*, 1(2):pp:132-165
- Badan Pusat Statistik. 2017. [Http://bps.go.id/](http://bps.go.id/). Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2017.
- Badan Pusat Statistik Bali. 2017. PDRB 2010-2016 Menurut Produksi dan Pengeluaran. Denpasar: BPS Bali
- _____. 2017. Inflasi. Denpasar: BPS Bali
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Case, Karl E dan Fair, Ray C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga
- Christopher Heady. 2009. Tax Policy for Economic Recovery and Growth. *Journal University Kent School Of Economic*.
- Greytak, David and Bernard Jump, 1977. Inflation and Local Government Expenditures and Revenues: Method and Case Studies. *Journal Public Finance*, 5(3):pp:275-302
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.

- Gunawan, Andri. 2016. Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.17(3). 2016
- Herman. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.*Jurnal Trisakti*. Universitas Trisakti 7(1).2007.
- Izedonmi,F.I.O., &Okunbor,J.A.2014. TheRoles OfTax Revenue In The EconomicGrowthOf Nigeria.*BritishJournal OfEconomics, Management &Trade*.4(12):pp:1999-2007.
- Jimiramdani. 2016. Perubahan Tahun Dasar Angka Indeks. www.geocities.ws/jimiramdani_cci05/statistik020506.ppt. Diakses 28 Agustus 2017
- Kusmono, Heru. 2011. Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal USU*, 13(2). 2016
- Kuznets, Simon. 2009. Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Journal*, 14(2):pp:335-357
- Lukman. 2016. Teori dan Asas Pemungutan Pajak 2016. <http://kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/>.Diakses 20 Agustus 2017.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Myles,G.D.2000. TaxationAnd EconomicGrowth. *Institute Of Fiscal Studie Journal*. 21(1):pp:141-168.
- Nazrulloh, Nazar. 2015. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Unikom*, Universitas Komputer Indonesia.
- Nersiwad.2002. PengaruhInflasiterhadap NilaiRiilPenerimaanPajak Negara: PendekatanElastisitas danTax *CollectionLags* di Indonesia. *JurnalAnalisaKebijakan*, 1(1).
- Nuraheni, Dwi. 2011. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi*.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuryani.2016. Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia.*E-Journal Unila*, 2(5). 2016

- Nota Keuangan dan APBN T.A. 2017. Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-nk-apbn.asp>. diakses 20 Agustus 2017.
- Peacock, Alan T. & Wiseman, Jack. 1961. The Growth Of Public Expenditure Volatility In Indonesia. *Journal Post-Reformation Era*, 9(2):pp:209-225.
- Pratama, Putra N. 2016. Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Universitas Brawijaya 8(1). 2016
- Prasojo, Eko. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Penerimaan PPN Di Kanwil DJP Jateng I). *Tesis*. Universitas Stikubank.
- Rahmawati, Embun. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di DKI Jakarta. *Tesis*. Universitas Bina Nusantara.
- Renata, Almira H. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Jawa Timur. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1) 2016.
- Schenk, Alan dan Oldman, Oliver. 2001. VAT A comparative Approach with Materials and Case. *Journal New York Transnational Publisher*, 6(2):pp:451-472
- Sinaga, A. R. 2010. Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Siregar, Henry. 2014. Teori Pertumbuhan Neo Klasik. <http://henrysiregar.blogspot.co.id/2014/06/teori-pertumbuhan-ekonomi-neo-klasik.html>. Diakses 12 September 2017.
- Suhada, Yusrina. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. *Jurnal e-Proceeding*. Universitas Telkom. 3(1).
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2012. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Taha, Roshaliza. 2011. The Effect Of Economic Growth on Taxation Revenue. *Journal of Economics and Sustainable Developments*, 11(9):pp:1027-1032.
- Tait, Alan A. 1988. Value Added Tax International Practice and Problems. Washington D.C. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2):pp:34-40.
- Tanzi, Vito. 1977. Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue. *Journal Staff Papers – International Monetary Fund*, 24(1):pp:119-136.
- Triastuti, Dian. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *Jurnal e-Proceeding*. Universitas Telkom. 3(1).2016 ISSN: 2355-9357
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PpnBM).
- Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utari, Woro. 2008. Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Trunojoyo*. Universitas Wijaya Putra
- Velaj, Entela And Prendi, Liambi. 2014. Tax Revenue – The Determinant Factors- The Case Of Albania. *European Scientific Journal*, 1(1):pp:521-548.
- Zeng, Kanghua, Shan Li, Qian Li. 2013. The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure *Journal Modern Economy*, 2(4):pp: 839-851.